

PERTAMBANGAN

Ribuan Izin Usaha Diduga Bermasalah

Jakarta, Kompas - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan, rekonsiliasi atau pendataan semua izin usaha pertambangan tuntas tahun 2012. Hingga saat ini, masih ada ribuan izin usaha pertambangan yang bermasalah.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Thamrin Sihite, akhir pekan lalu di Jakarta, menyatakan, total izin usaha pertambangan (IUP) yang diklarifikasi pemerintah sekitar 9.000 IUP.

Untuk tahap pertama, klarifikasi 3.000 IUP selesai, dan dinyatakan berstatus tuntas atau tidak tumpang tindih lahan dan perizinan lagi.

"Untuk tahap kedua, kami akan segera mengumumkan, sekitar 700 IUP lolos verifikasi, tidak tumpang tindih lahan dan perizinan lagi. Sekarang masih tahap finalisasi," katanya.

"Pengumumannya tergantung dokumen-dokumen yang ada. Kami akan mengumpulkan lagi seluruh gubernur dan bupati atas pemberian IUP yang tidak tuntas pada Januari-Februari ini. Masih ada sekitar 5.000 IUP yang belum tuntas," ujarnya.

Dalam proses pendataan itu, pihaknya menemukan ada masalah dalam proses pemberian izin. Sebagai contoh, ada IUP yang diterbitkan bupati dan pemegang izin langsung berproduksi, padahal prosedur pemberian izin itu harus melalui tahap penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi.

Ada juga surat keputusan bupati tahun 2008, tetapi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010. "Itu artinya dibuat-buat surat keputusannya. Kami harus hati-hati di situ," ujarnya.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesia Syahrir AB, beberapa waktu lalu, memaparkan, saat ini adalah rezim perizinan dengan skala pertambangan menengah dan kecil.

Hal ini membuat industri tambang Indonesia tidak lagi diminati perusahaan tambang multinasional dan kontrol pemerintah jadi tidak efektif.

"Ketidakefektifan kontrol pemerintah telah ditandai oleh keluarnya lebih dari 9.000 IUP oleh pemerintah daerah dan baru sekitar 2.600 IUP yang teregistrasi tuntas," katanya. (EVY)